



Article Informations  
Corresponding Email:  
Alyazp177@gmail.com

Received: 06/08/2025; Accepted:  
10/01/2026; Published: 26/02/2026

## **Faktor Penghambat Pencapaian Indonesia Kepentingan Ekonomi Dengan Jepang Melalui The Java North Upgrading Project**

**Alya Zahra Pradani**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menghambat Indonesia dalam mencapai kepentingan ekonomi melalui kerja sama dengan Jepang dalam proyek The Java North Line Upgrading Project. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan mendorong transfer teknologi, namun dibatalkan pada tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori Ekonomi Politik Internasional Robert Keohane, ditemukan tiga penghambat utama: (1) kelemahan institusi domestik seperti birokrasi yang lambat dan tumpang tindih regulasi, (2) kurangnya koordinasi antar instansi dalam konteks interdependensi kompleks, dan (3) minimnya transparansi serta rendahnya kredibilitas tata kelola proyek. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan perbaikan koordinasi dalam proyek infrastruktur strategis nasional.

**Kata Kunci:** Kepentingan nasional ekonomi, Indonesia–Jepang, *Java North Line Upgrading Project*, interdependensi kompleks, transparansi.

### **Abstract**

*This study examines the factors that hinder Indonesia from achieving its economic interests through cooperation with Japan in the Java North Line Upgrading Project. The project was expected to strengthen connectivity and promote technology transfer; however, it was cancelled in 2023. Using a qualitative descriptive approach and Robert Keohane's theory of International Political Economy, the research identifies three main obstacles: (1) weak domestic institutions, including slow bureaucracy and overlapping regulations; (2) lack of inter-agency coordination within the context of complex interdependence; and (3) limited transparency and low credibility in project governance. The findings highlight the need for institutional strengthening and improved coordination in the implementation of strategic national infrastructure projects.*

**Keywords:** Economic national interest, Indonesia–Japan, *Java North Line Upgrading Project*, complex interdependence, transparency.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, sektor transportasi darat, khususnya perkeretaapian, menjadi fokus penting dalam mewujudkan konektivitas antarwilayah serta mempercepat mobilitas barang dan jasa. Proyek *The Java North Line Upgrading Project*—yang bertujuan mengubah jalur kereta Jakarta–Surabaya menjadi semi-cepat dengan kecepatan hingga 160 km/jam—dirancang untuk memperkuat konektivitas Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam proyek ini mencerminkan bentuk interdependensi ekonomi bilateral yang telah terjalin lama. Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), telah terlibat dalam pendanaan dan perencanaan proyek-proyek strategis di Indonesia, termasuk sektor perkeretaapian. Dalam konteks *The Java North Line Upgrading Project*, dukungan Jepang meliputi studi kelayakan, penyusunan desain dasar, dan pemberian pinjaman infrastruktur. Namun, proyek ini dibatalkan secara tiba-tiba pada tahun 2023, menyusul dinamika politik dan teknis di internal pemerintahan Indonesia.<sup>2</sup>

Pembatalan proyek strategis ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas tata kelola, kredibilitas kebijakan, serta kesiapan institusional Indonesia dalam menjaga komitmen dan mencapai kepentingan ekonominya dalam kerangka kerja sama internasional. Selain faktor teknis, kegagalan pelaksanaan proyek ini diduga kuat berkaitan dengan persoalan kelembagaan domestik, rendahnya transparansi, dan kurangnya koordinasi lintas sektor, sebagaimana disoroti dalam laporan JICA dan sejumlah media nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Avivi, Yusron, and Muhnizar Siagian. “Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).” *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 49–61, doi:10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Prasodjo, Haryo, et al. “Analisis Alasan Jepang Bekerjasama Dengan Indonesia Dalam Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.” *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, vol. 5, no. 2, June 2022, pp. 90–101, doi:10.23969/transborders.v5i2.5169.

Dalam konteks Ekonomi Politik Internasional (EPI), fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif Robert Gilpin yang memandang interaksi antara aktor negara dan non-negara dalam pasar global sebagai arena perebutan kepentingan nasional. Negara bukanlah entitas pasif, tetapi aktif membentuk kebijakan pembangunan dan investasi demi mencapai posisi strategis di tengah arus globalisasi. Proyek *The Java North Line Upgrading Project* menjadi studi kasus menarik dalam melihat bagaimana kelemahan internal suatu negara dapat menjadi penghambat dalam mengoptimalkan peluang kerja sama internasional.<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Indonesia dalam mencapai kepentingan ekonominya melalui proyek kerja sama dengan Jepang tersebut. Fokus utamanya diarahkan pada tiga aspek: (1) kelemahan institusi domestik dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek; (2) minimnya koordinasi dalam konteks interdependensi kompleks antara berbagai pemangku kepentingan; serta (3) rendahnya transparansi dan kredibilitas tata kelola proyek.<sup>5</sup>

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya refleksi kritis terhadap kelembagaan dan tata kelola pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan memahami faktor penghambat dalam kerja sama proyek strategis ini, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif, kredibel, dan berkelanjutan, khususnya dalam menarik investasi asing dan membangun kepercayaan mitra internasional. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur Ekonomi Politik Internasional dengan menyajikan studi empiris dari negara berkembang yang mengalami tantangan dalam memanfaatkan interdependensi ekonomi global secara optimal.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Imaduddin, Achmad Hanif, and S. Dian Andryanto. "Rekam Jejak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Dikaji Era SBY Dan Peletakan Batu Pertama Jokowi." *Tempo*, <https://www.tempo.co/ekonomi/rekam-jejak-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-dikaji-era-sby-dan-peletakan-batu-pertama-jokowi-273675>. Accessed 9 Dec. 2024.

<sup>6</sup> *Ibid*

## 2. PEMBAHASAN

Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang telah berlangsung erat sejak 1958 dan terus berkembang, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Jepang menjadi mitra utama dalam proyek strategis nasional seperti MRT Jakarta, Pelabuhan Patimban, dan proyek rel kereta cepat. Dalam konteks *The Java North Line Upgrading Project*, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) berperan dalam pendanaan dan penyusunan studi kelayakan proyek. Proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi jalur kereta utara Pulau Jawa menjadi semi-cepat (hingga 160 km/jam), sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>7</sup>

Proyek yang semula dijadwalkan dimulai pada 2024 ini justru dibatalkan pada 2023. Pembatalan ini mencerminkan adanya persoalan serius dalam tata kelola proyek dan efektivitas koordinasi antara aktor dalam negeri dan mitra asing. Oleh karena itu, studi ini memandang penting untuk menganalisis dinamika kerja sama infrastruktur antara Indonesia dan Jepang melalui lensa teori Ekonomi Politik Internasional.<sup>8</sup>

Robert Keohane dalam kerangka Ekonomi Politik Internasional (EPI) menyatakan bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem ekonomi global. Negara memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan proses globalisasi ekonomi melalui kebijakan pembangunan dan kontrol atas lembaga domestik. Keohane juga menekankan bahwa struktur kekuasaan internasional dan dinamika domestik saling memengaruhi dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.<sup>9</sup>

Keohane memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menjelaskan bagaimana kekuatan negara, kelembagaan, serta interaksi dengan aktor internasional memengaruhi hasil akhir dari suatu proyek strategis. Negara berkembang seperti Indonesia sering kali mengalami

---

<sup>7</sup> Ramadhani, Dinda, et al. "Kepentingan Indonesia Terhadap Jepang Dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya." *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, vol. 7, no. 1, Jan. 2022, p. 33, doi:10.21111/dauliyah.v7i1.7539

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Nathalia, Benita. "ANALISIS YURIDIS ASPEK HUKUM INVESTASI DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA PADA PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, vol. 14, no. 4, Dec. 2023.

ketimpangan dalam kapasitas kelembagaan dan perumusan kebijakan yang berdampak pada efektivitas kerja sama dengan negara maju seperti Jepang. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teori EPI Keohane untuk mengkaji tiga faktor utama penghambat proyek: (1) kelemahan institusi domestik, (2) kurangnya koordinasi antaraktor dalam sistem interdependensi kompleks, dan (3) minimnya transparansi serta kredibilitas tata kelola proyek.<sup>10</sup>

*The Java North Line Upgrading Project* adalah proyek peningkatan jalur kereta api dari Jakarta hingga Surabaya sepanjang ±725 km. Proyek ini bertujuan meningkatkan kecepatan kereta dari 70–90 km/jam menjadi 120–160 km/jam, melalui modernisasi rel, sistem sinyal, dan elektrifikasi sebagian jalur. Koridor ini merupakan salah satu jalur transportasi tersibuk di Indonesia dan menjadi tulang punggung logistik nasional.

Kerja sama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang melalui JICA. Jepang menyediakan pinjaman sebesar 70 miliar yen (±9 triliun rupiah) serta bantuan teknis dan pelatihan SDM. Setelah studi kelayakan rampung, penandatanganan kesepakatan dilakukan pada 28 Juni 2022 di Tokyo, dilanjutkan finalisasi teknis dan administratif di Jakarta pada Oktober 2022. Proyek dirancang berlangsung hingga 2029, melibatkan banyak aktor mulai dari kementerian hingga kontraktor swasta.

Proyek *The Java North Line Upgrading Project* menghadapi tantangan seperti pembebasan lahan, koordinasi antarinstansi, dan modernisasi teknologi. Jika berhasil, proyek ini akan memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan industri, serta menciptakan ribuan lapangan kerja. Jalur utara Jawa merupakan tulang punggung logistik nasional yang menghubungkan kota industri seperti Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Modernisasi jalur ini diharapkan menurunkan biaya logistik, mempercepat pergerakan barang dan orang, serta meningkatkan daya saing nasional, dengan jalur kereta yang lebih cepat dan efisien, proyek ini memperkuat konektivitas antarkota dan memperluas akses

---

<sup>10</sup> *Ibid*

ekonomi ke daerah-daerah. Dampaknya meliputi tumbuhnya UMKM, urbanisasi produktif, serta pemerataan pembangunan.<sup>11</sup>

Proyek ini menjadi etalase investasi infrastruktur Indonesia. Keterlibatan Jepang sebagai mitra strategis meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap iklim bisnis nasional. Selain itu, proyek ini diharapkan memperluas basis kerja sama ke sektor-sektor lain seperti energi dan manufaktur. Jepang juga memiliki kepentingan kuat dalam proyek ini, yang berkaitan langsung dengan strategi ekonomi dan geopolitik mereka. Jepang memiliki banyak perusahaan di Jawa, terutama sektor otomotif.<sup>12</sup>

Jalur kereta yang lebih cepat mendukung distribusi barang dari pabrik ke pelabuhan dengan lebih efisien. Proyek ini menjadi pintu bagi Jepang menanamkan teknologinya, baik dalam sistem sinyal, rel, hingga manajemen proyek. Ini memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisi perusahaan Jepang di Asia Tenggara. Melalui transfer teknologi dan pelatihan, Jepang menciptakan ketergantungan teknis dari Indonesia, yang memperkuat hubungan jangka panjang kedua negara.<sup>13</sup>

Di tengah dominasi Tiongkok lewat Belt and Road Initiative, proyek ini menjadi alat diplomasi ekonomi Jepang untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara. Proyek ini memperkuat infrastruktur pendukung IJEPA dan RCEP, sehingga perdagangan bilateral dan regional bisa berlangsung lebih efisien. Jepang memandang proyek ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mempertahankan stabilitas rantai produksi, pengaruh geopolitik, dan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan Indonesia.<sup>14</sup>

Kelemahan institusi domestik menjadi faktor utama kegagalan Indonesia dalam mengoptimalkan kerja sama proyek JNLU. Birokrasi yang

---

<sup>11</sup> *Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Semarang* – KPPIP. [https://kppip.go.id/berita/proyek-pembangunan-kereta-api-cepat-jakarta-semarang/?utm\\_source=chatgpt.com](https://kppip.go.id/berita/proyek-pembangunan-kereta-api-cepat-jakarta-semarang/?utm_source=chatgpt.com). Accessed 12 Feb. 2025.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Mahardhika, Lorenzo Anugrah, and Rio Sandy Pradana. "Kemenhub Jelas kan Nasib Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya." *Bisnis.Com*, 12 Feb. 2024, [https://ekonomi.bisnis.com/read/20240212/98/1740151/kemenhub-jelaskan-nasib-proyek-kereta-semi-cepat-jakarta-surabaya?utm\\_source=chatgpt.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20240212/98/1740151/kemenhub-jelaskan-nasib-proyek-kereta-semi-cepat-jakarta-surabaya?utm_source=chatgpt.com).

<sup>14</sup> *Ibid*

tidak efisien, tumpang tindih kewenangan antar lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan pemerintah daerah, serta minimnya strategi nasional jangka panjang menyebabkan ketidaksinkronan perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kurangnya koordinasi memperlemah posisi tawar Indonesia di hadapan Jepang. Selain itu, praktik korupsi, politik transaksional, serta lemahnya akuntabilitas dalam proses pengadaan dan pembebasan lahan menciptakan ketidakpercayaan dari pihak Jepang.<sup>15</sup>

Sumber daya manusia yang kurang kompeten dan institusi pengawasan yang lemah memperburuk tata kelola proyek. Indonesia tampak reaktif terhadap tawaran kerja sama tanpa memperkuat visi domestik yang strategis. Robert Keohane menekankan pentingnya institusi yang kuat dan kredibel dalam sistem ekonomi global. Lemahnya kredibilitas institusi Indonesia menyebabkan Jepang meragukan efisiensi penggunaan dana bantuan. Ketiadaan arah pembangunan dan peran aktif negara memperkecil potensi keberhasilan kerja sama, dalam kerangka interdependensi kompleks Keohane dan Nye, keberhasilan kerja sama internasional menuntut sinergi lintas sektor.<sup>16</sup>

Indonesia gagal menunjukkan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Tiadanya satu badan pengelola terpadu membuat perencanaan proyek tidak sinkron, menyulitkan Jepang dalam membaca arah kebijakan Indonesia. Ketiadaan forum koordinasi lintas kementerian menyebabkan proyek berdiri sendiri tanpa dukungan ekosistem sektor logistik dan industri. Proyek tidak terintegrasi dalam visi pembangunan nasional jangka panjang. Lemahnya komunikasi eksternal memperparah kesalahpahaman dan memperlemah kredibilitas Indonesia di mata Jepang.<sup>17</sup>

Keohane menyatakan bahwa negara harus mampu mengelola hubungan global secara strategis. Namun, dalam konteks JNLU, Indonesia gagal menjadi perancang utama kerja sama dan justru menunjukkan

---

<sup>15</sup> Hidayat, Achmad Nur, and Fachru Nofrian Bakarudin. *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Alunaza, Hardi, and Anggi Putri. "Ekonomi Politik Jepang Di Asia Tenggara: Resensi Buku." *Indonesian Perspective*, vol. 7, no. 1, June 2022, doi:10.14710/ip.v7i1.48599.

kekacauan internal yang membuat hubungan bilateral tidak seimbang. Transparansi yang rendah dan kredibilitas tata kelola yang lemah menjadi hambatan besar dalam kerja sama proyek JNLU. Pemerintah Indonesia tidak menyediakan pelaporan yang terbuka dan konsisten kepada publik maupun Jepang. Ketiadaan sistem akuntabilitas membuat Jepang ragu akan efisiensi penggunaan dana pinjaman dari JICA.<sup>18</sup>

Proses tender yang tertutup, tidak adanya evaluasi berkala, serta konflik kepentingan memperburuk persepsi Jepang terhadap integritas pengelolaan proyek. Tidak tersedianya dashboard informasi publik atau pelibatan masyarakat sipil membuat akuntabilitas semakin rendah. Proyek besar seperti JNLU semestinya tunduk pada prinsip good governance. Keohane menekankan bahwa reputasi negara bergantung pada tata kelola yang bersih dan konsisten. Ketika transparansi tidak ditegakkan, kepercayaan mitra strategis seperti Jepang akan menurun. Akibatnya, potensi proyek tidak dapat direalisasikan secara optimal dan Indonesia kehilangan peluang memperkuat posisi tawarnya dalam sistem ekonomi global.<sup>19</sup>

### **3. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kepentingan ekonominya melalui kerja sama dengan Jepang dalam *Java North Line Upgrading Project*. Dengan menggunakan perspektif ekonomi politik internasional Robert Keohane, ditemukan bahwa hambatan utama berasal dari faktor domestik, bukan eksternal.

Pertama, kelemahan institusi domestik seperti birokrasi lamban, regulasi tumpang tindih, dan lemahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan proyek tidak berjalan efisien. Ini menurunkan kredibilitas Indonesia dan menghambat pencapaian tujuan ekonomi nasional.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Urip Sulistiyo, Ph.D., and PT. Salim Media Indonesia. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. PT Salim Media Indonesia, 2023.

interdependensi kompleks antara berbagai aktor domestik tidak diiringi dengan koordinasi yang memadai. Ketidaksinkronan antara Kementerian Perhubungan, Bappenas, BUMN, dan pemerintah daerah menunjukkan kegagalan dalam mengelola kerja sama internasional secara optimal, sesuai dengan teori Keohane dan Nye. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek memperburuk kepercayaan Jepang terhadap Indonesia. Proses tender yang tidak terbuka, lemahnya pengawasan, serta ketidakpastian kebijakan menunjukkan belum matangnya tata kelola proyek strategis nasional. Dinamika politik domestik, termasuk pencabutan proyek dari daftar PSN, turut memperburuk situasi dan menunjukkan rendahnya konsistensi kebijakan jangka panjang. Dampaknya.

Jepang mulai meragukan Indonesia sebagai mitra strategis dan mempertimbangkan kerja sama dengan negara ASEAN lain yang dinilai lebih kredibel. Hal ini merugikan posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi kawasan. Untuk mencegah kegagalan serupa, pemerintah perlu melakukan reformasi tata kelola proyek strategis nasional dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kapasitas institusi. Meskipun proyek ini gagal, kerja sama Indonesia–Jepang tetap memiliki potensi besar di sektor lain seperti energi terbarukan, digitalisasi, dan pendidikan. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini penting untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di masa depan.

## REFERENSI

- Alunaza, Hardi, and Anggi Putri. "Ekonomi Politik Jepang Di Asia Tenggara: Resensi Buku." *Indonesian Perspective*, vol. 7, no. 1, June 2022. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48599>.
- Avivi, Yusron, and Muhnizar Siagian. "Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)." *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 49–61. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967.66>
- Hidayat, Ahmad Maulana Nur, and Andi Purwono. "Pengaruh Penerapan Indonesia-Japan Economy Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap..." (*Data referensi tidak lengkap – perlu dilengkapi untuk entri MLA yang valid.*)
- Imaduddin, Achmad Hanif, and S. Dian Andryanto. "Rekam Jejak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Dikaji Era SBY Dan Peletakan Batu Pertama Jokowi." *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/rekam-jejak-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-dikaji-era-sby-dan-peletakan-batu-pertama-jokowi-273675>. Accessed 9 Dec. 2024.
- "KPPIP: Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta–Semarang." *KPPIP*, [https://kppip.go.id/berita/proyek-pembangunan-kereta-api-cepat-jakarta-semarang/?utm\\_source=chatgpt.com](https://kppip.go.id/berita/proyek-pembangunan-kereta-api-cepat-jakarta-semarang/?utm_source=chatgpt.com). Accessed 12 Feb. 2025.
- Mahardhika, Lorenzo Anugrah, and Rio Sandy Pradana. "Kemenhub Jelaskan Nasib Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta–Surabaya." *Bisnis.com*, 12 Feb. 2024.
- Nathalia, Benita. "Analisis Yuridis Aspek Hukum Investasi Dalam Kerjasama Internasional Antara Indonesia Dengan China Pada Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, vol. 14, no. 4, Dec. 2023.
- Prasodjo, Haryo, et al. "Analisis Alasan Jepang Bekerjasama Dengan Indonesia Dalam Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya." *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, vol. 5, no. 2, June 2022, pp. 90–101. <https://doi.org/10.23969/transborders.v5i2.5169>.
- Ramadhani, Dinda, et al. "Kepentingan Indonesia Terhadap Jepang Dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya." *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, vol. 7, no. 1, Jan. 2022, p. 33. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i1.7539>.
- Sulistiyo, Urip, and PT. Salim Media Indonesia. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia, 2023.

